

PARTICIPATORY GOVERNANCE DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI KELURAHAN MANGGALA KOTA MAKASSAR

Normayanty^{1*}, Nasrul Haq², Abdul Mahsyar¹

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study purposed to determine participatory governance in empowering farmer groups. The study used qualitative research, while the informants were 4 people. Data collection techniques with in-depth interviews with a number of informants., Direct observation, documentation. The results of this study showed that the lack of socialization by the government to farmers about the importance of farmer groups, as well as the provision of counseling, understanding in socializing the problem. This was seen from the indicators: (1) Socialization in which the government provided knowledge about the function of the government as a facilitator and mentoring to farmer groups in community empowerment (2) Assistance in the process by which the government carried out both knowledge and technical assistance to the farming community (3) Training- training provided by the government to farmer groups in empowering farmer groups, both providing facilities and knowledge of hazardous materials used by farmers and (4) Field Visits conducted by the local government directly to farmers and carried out directly in the field or in the fields being cultivated by the farming community.

Keywords: *participatory governance, farmer groups*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *participatory governance* dalam pemberdayaan kelompok tani. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif, adapun informan sebanyak 4 orang. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam terhadap sejumlah informan., observasi langsung, dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada petani tentang pentingnya kelompok tani, serta pengadaan penyuluhan, pemahaman dalam mensosialisasikan masalah. Hal ini dilihat dari indikator : (1) Sosialisasi dimana pemerintah memberikan pengetahuan tentang fungsi pemerintah sebagai fasilitator dan pendampingan pada kelompok tani dalam pemberdayaan masyarakat (2) Pendampingan proses dimana pemerintah melakukan dampingan baik itu secara pengetahuan maupun teknis kepada masyarakat tani (3) Pelatihan-pelatihan yang diberikan pemerintah keada kelompok tani dalam memberdayakan kelompok tani baik itu memberikan fasilitas maupun pengetahuan bahan berbahaya yang digunakan petani dan (4) Kunjungan Lapangan yang dilakukan pemerintah setempat langsung kepada petani dan dilakukan langsung di lapangan atau di sawah yang sedang digarap oleh masyarakat tani.

Kata Kunci: *participatory governance, kelompok tani*

* normayanty@gmail.com

PENDAHULUAN

Di era yang semakin berkembang ini, suatu bangsa dituntut untuk mampu membuat strategi pembangunan yang berkelanjutan dalam memajukan dan meningkatkan kesejahteraan bangsanya. Dalam hal ini guna pembangunan partisipasi yang merupakan bagian dari rangka pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses dimana sejumlah pelaku bermitra memiliki pengaruh dan wewenang di dalam prakarsa pembangunan, termasuk mengambil keputusan atas sumber daya.

Pembangunan ini dapat berupa pembangunan fisik maupun sumber daya lainnya yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat kelompok tani. Dalam pemberdayaan kelompok tani tentunya pemerintah berperan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta pendampingan yang dapat menggerakkan partisipasi total masyarakat penyuluhan dan merespon dan memantau perubahan yang terjadi di masyarakat dan pelayanan berfungsi sebagai unsur ketepatan distribusi aset sumber daya fisik dan non fisik yang diperlukan masyarakat.

Telah diatur dalam regulasi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya pada Bab III mengenai penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya bahwa dalam hal pengembangan untuk memperkuat kelembagaan masyarakat maka pemerintah harus mampu menerapkan serta melaksanakan kegiatan melalui apresiasi, sosialisasi, fasilitasi, pendampingan kelembagaan, dan pelatihan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat harus membutuhkan pelayanan dari pemerintah. Pelayanan oleh pemerintah harus mencakup semua bidang, salah satunya yaitu pelayanan terhadap pembangunan sektor pertanian dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Diperkuat oleh aturan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa telah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dijelaskan pada pasal 7 ayat (3) bahwa strategi pemberdayaan petani dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan

sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi, dan jaminan luas lahan pertanian, penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi serta informasi, dan penguatan kelembagaan petani. Berdasarkan peraturan tersebut maka jelaslah bahwa pemerintah harus memberikan perhatian lebih terhadap pertanian. Dengan demikian, pemberdayaan kelompok tani sebagian di Kelurahan Manggala masih relatif rendah. Dimana keterlibatan partisipasi masyarakat masih rendah dalam memanfaatkan lahan, dimana kualitas sumber daya masyarakat lemah kreativitas, sehingga menyebabkan pemasaran menjadi rendah. Yang dimana seharusnya kelompok tani itu harus memiliki anggota kelompok tani yang berpengetahuan agar mampu menjalankan dan memberdayakan kelompok tani dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki sebagai seorang kelompok tani.

Kecamatan Manggala merupakan salah satu dari 15 Kecamatan di kota Makassar dengan luas wilayah 24.14 kilometer persegi atau sekitar 13.7% dari luas wilayah Kota Makassar. Sejak tahun 2017 Kecamatan ini memiliki 7 kelurahan dengan luas 24,14 km². Kelurahan yang paling luas adalah

Tamangapa yaitu 7,62 km², sedangkan kelurahan yang wilayahnya paling kecil di Kecamatan Manggala adalah Kelurahan Borong dan Batua. Melihat potensi yang ada di Kelurahan Manggala, maka pembangunan dibidang pertanian merupakan salah satu yang harus menjadi perhatian pemerintah. Namun perhatian pemerintah sangat minim terhadap kelompok tani yang ada di Kelurahan Manggala.

Partisipasi pemerintah sebagai (dinamisator) juga menjadi hal yang tidak sesuai dengan harapan yang terjadi di Kelurahan Manggala, realita yang terjadi bahwa pemerintah kurang aktif terjun langsung kepada masyarakat untuk memberikan berbagai macam pemahaman, serta pemerintah masih tidak secara aktif dalam mendampingi petani seperti memberikan bimbingan secara langsung dalam mengelola pertanian maupun pelatihan kepada masyarakat. Kurangnya keterlibatan pemerintah untuk turun kelapangan melihat kondisi yang terjadi di lapangan. Hal demikian dapat dilihat dari minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada petani tentang petingnya kelompok tani, serta pengadaan penyuluhan, pemahaman dalam mensosialisasikan masalah atau solusi bagi masyarakat petani dan

pendampingan yang kurang maksimal. Selanjutnya pemerintah masih tidak secara aktif dalam mendampingi masyarakat petani memberikan bimbingan secara langsung dalam mengelola pertanian maupun pelatihan kepada masyarakat. Kemudian mengenai pelatihan masyarakat petani sangat membutuhkan kegiatan-kegiatan pelatihan dari pemerintah untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

Partisipasi pemerintah diharapkan mampu memberikan peranan penting serta mampu memberi sumbangsi yang positif kepada masyarakat mengenai pemberdayaan masyarakat dengan harapan pemerintah mampu menjadi objek dalam memberikan fasilitas kepada masyarakat, mengedepankan perkembangan yang berorientasi pada kemajuan masyarakat dalam kaitannya dengan bidang pertanian. Sehingga masyarakat membutuhkan partisipasi pemerintah baik sebagai penyedia aturan dasar bagi masyarakat demi pengembangan petani (regulator), juga motor penggerak masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat (dinamisator) serta sebagai media yang mampu menciptakan segala hal yang menjadi kekurangan dan dibutuhkan oleh masyarakat (fasilitator) agar tujuan untuk pengembangan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Pemerintah

selaku penyedia sarana dan prasana bagi masyarakat fasilitator sudah mampu menyediakan kebutuhan masyarakat dalam hal pemberdayaan masyarakat pada kelompok tani di Kelurahan Manggala sebagaimana fungsi pemerintah sebagai media untuk memberikan fasilitas yang memadai bagi petani, namun bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat kurang dimanfaatkan oleh masyarakat tani karena masalah teknis penggunaan maupun pemanfaatan yang masyarakat itu sendiri kurang paham. Selain itu kurang berperannya pemerintah dalam pengurusan administrasi pengadaan depot pupuk, karena pelaksanaannya belum merata pada setiap kelompok tani yang ada di Kelurahan Manggala dan masalah pun muncul ketika informasi tidak merata kepada setiap masyarakat kelompok tani.

Pemerintah memberikan bantuan kepada kelompok tani agar dapat melengkapi kebutuhan kelompok tani dalam melakukan kegiatan usahanya. Berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan yang berupa pupuk, dan bibit kepada para anggota kelompok tani tidak berjalan secara menyeluruh karena adanya anggota yang dapat bantuan, dan adapula yang tidak mendapatkan. Bukan hanya itu,

penginformasian tentang penyelenggaraan juga tidak jelas jadwalnya. Kelompok tani melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan pertanian untuk meningkatkan kelompok tani. Tetapi pada kenyataannya yang terjadi masih ada anggota kelompok tani belum memiliki kemampuan dan potensi yang begitu baik dalam mengelola pertanian yang ada pada kelompok tani tersebut. Masih ada kelompok tani yang tidak bekerja sesuai apa yang diharapkan.

Secara singkat pengertian governance menurut Mardiasmo (2002:24) dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. Sedangkan Sedarmayanti (2004:2) menyatakan bahwa governance lebih merupakan serangkaian proses interaksi-interaksi sosial antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. Ananto Basuki dan Showfan (2006 :15) mengatakan Good Governance merupakan upaya untuk merubah watak pemerintah (Government) yang semula cenderung bekerja sendiri tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat, menjadi pemerintah yang aspiratif.

Sedangkan pengertian Good Governance menurut Bank Dunia (World Bank) dalam (Mulyadi, 2015:130) yaitu cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya social dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat. Sedangkan menurut UNDP (United National Development Planning) mendefinisikan governance adalah “Governance is the exercise of veconomic, political, and administrative author to manage a country’s affairs at all levels an means by which states promote social cohesion, integration and ensure the well being of their population”. Atau Kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan atau kekuasaan dibidang ekonomi, politik, dan administrative dalam mengelola berbagai urusan negara pada tiap tingkatannya dan merupakan suatu instrument kebijakan negara dalam mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas social dalam masyarakat.

Dari prinsip-prinsip tersebut, partisipasi merupakan suatu hal yang penting bagi negara-negara yang menganut paham demokrasi. Menurut Wagle (Imtihan, dkk., 2017) demokrasi akan bermakna ketika masyarakat ikut serta pada proses pembuatan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam Good

Governance menuntut adanya hubungan langsung antara pemerintah dan masyarakat, yang bukan hanya dalam bentuk perwakilan melalui partai politik atau dewan perwakilan rakyat.

Munculnya konsep Participatory governance merupakan implikasi dari pergeseran makna kata partisipasi. Konsep tersebut diperkenalkan oleh Fung dan Wright dalam tulisannya "Deepening Democracy : Innovation In Empowered Participation Governance". Tulisan tersebut merupakan hasil eksperimen mereka dengan mengambil sejumlah kasus di beberapa Negara tentang pengembangan pemerintahan partisipatif. Pemerintahan partisipatif (participatory governance) merupakan suatu pemerintahan yang menempatkan masyarakat (non pemerintah) sebagai individu atau kelompok sebagai stakeholders dalam proses pengambilan kebijakan publik yang selama ini cenderung hanya didominasi oleh pemerintah (Widiyarta dan Rining,2016).

Selain itu dalam *Public Administration and Democratic Governance: Governments Serving Citizens* (Rahman, 2016:40) menyatakan bahwa participatory governance menjelaskan keterlibatan pemerintah dengan kelompok-kelompok yang berkepentingan untuk

mengambil ruang atau tempat untuk membentuk sebuah proses negosiasi dan kolaborasi antara lembaga pemerintahan dan kelompok.

Partisipasi adalah ketelribatan spontan dengan kesadaran disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan, Partisipasi masyarakat adalah suatu proses akti dimana penduduk desa secara langsung ikut serta dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek atau program pembangunan yang mereka miliki dengan tujuan untuk menumbuhkan kemandiriannya, meningkatkan pendapatannya dan pengembangan (Porawouw, 2005)

Fadhillah (2016) mendefinisikan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yaitu hak tindakan masyarakat dalam proses menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan, serta tuntutan terhadap kebijakan pemerintah, serta akses untuk masuk dan terlibat aktif dalam menentukan dan memengaruhi kebijakan serta melakukan control terhadap proses politik yang terkait dengan pemerintah. Dari kedua definisi diatas, secara singkat partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan

dan menentukan arah proses pembangunan.

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris “empowerment” yang dapat bermakna “pemberian kekuasaan” karena power bukan sekedar daya tapi juga kekuasaan sehingga kata “daya” tidak sengaja bermakna “mampu” tapi juga bermakna “mempunyai kekuasaan” (Wrihartnolo dan Dwijowitono, 2007).

Menurut Ife dan Tesoriero (2008: 510), Pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, kosa kata, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menentukan masa depan mereka sendiri dan untuk berpartisipasi serta mempengaruhi kehidupan masyarakatnya.

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya / kekuasaan (power) kepada pihak yang lemah (powerless), dan mengurangi kekuasaan (disempowered) kepada pihak yang terlalu berkuasa (powerfull) sehingga terjadi keseimbangan (Djohani, 2003).

Shardlow (Dalam (Djohani, 2003), pemberdayaan merupakan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk

masa depan sesuai dengan keinginan mereka.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan mengerahkan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (afektif, kognitif dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan, yang dilengkapi dengan kecakapan dan keterampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhan tersebut. (Ambar Teguh S, 2004:80-81).

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kelurahan Manggala Kota Makassar. Peneliti memilih tempat penelitian tersebut dengan alasan karena Ingin mengetahui pemberdayaan kelompok tani dan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pemberdayaan kelompok tani yang ada di Kelurahan Manggala.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian kualitatif, yaitu untuk menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami seperti participatory governance dalam pemberdayaan kelompok tani di Kelurahan Manggala.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dimana dalam memperoleh data dan informasi menggunakan landasan teori sebagai pemandu yang merupakan bahan pembahasan dari penelitian agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dan keadaan lokasi penelitian tersebut.

Sumber data dalam hal ini merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data berdasarkan sumbernya, adapun data

yang dibedakan menjadi bagian yaitu sebagai berikut: 1). Data primer (data utama) merupakan data yang didapat langsung dari sumber asli, yaitu hasil wawancara dan observasi peneliti terhadap informan mengenai bagaimana participatory governance dalam pemberdayaan kelompok tani di Kelurahan Manggala. 2). Data sekunder merupakan data penelitian yang didapat peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Adapun data sekunder yakni berupa data literature, artikel, jurnal, serta dari situs yang berkaitan di internet yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

Peneliti dalam hal ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan triangulasi/ gabungan. Triangulasi dapat diartikan sebagai teknik dalam pengumpulan data yang bersifat menyatukan dari berbagai suatu sumber data yang telah ada dengan teknik pengumpulan data.

Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan untuk sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Dalam model ini terdapat (tiga) komponen pokok. Menurut pendapat Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Participatory governance merupakan implikasi dari pergeseran makna kata partisipasi. Konsep tersebut diperkenalkan oleh Fung dan Wright dalam tulisannya “*Deepening Democracy : Innovation In Empowered Participation Governance*”. Tulisan tersebut merupakan hasil eksperimen mereka dengan mengambil sejumlah kasus di beberapa Negara tentang pengembangan pemerintahan partisipatif. Pemerintahan partisipatif (*participatory governance*) merupakan suatu pemerintahan yang menempatkan masyarakat (non pemerintah) sebagai individu atau kelompok sebagai *stakeholders* dalam proses pengambilan kebijakan publik yang selama ini cenderung hanya didominasi oleh pemerintah.

Dengan pemberdayaan masyarakat tani yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya yang memiliki indikator sebagai regulator dimana didalamnya terdapat aturan mendasar tentang mekanisme pemberdayaan masyarakat, pemerintah sebagai dinamisor didalamny terdapat peran

pemerintah dalam melakukan sosialisasi, pendampingan, pelatihan dan kunjungan lapangan, kemudian indikator ketiga pemerintah melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan kunci pada penelitian ini sebagai berikut yakni Kepala Dinas Pertanian Kota Makassar, Lurah Kecamatan Manggala dan Staf Penyuluhan Kelurahan Manggala.

Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses interaksi sosial melalui mana kita mengenal cara-cara berpikir, berperasaan dan berperilaku sehingga dapat berperan secara efektif dalam masyarakat. Sosialisasi juga dapat diartikan sebagai proses yang dialami individu dari masyarakatnya mencakup kebiasaan, sikap, norma, nilai-nilai, pengetahuan, harapan, ketrampilan yang dalam proses tersebut ada kontrol sosial yang kompleks sehingga anak terbentuk menjadi individu sosial dan dapat berperan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakatnya. Sosialisasi mempunyai arti dalam pembinaan kepribadian agar seseorang dapat hidup konform dengan tuntutan kelompok dan kebudayaannya. Sosialisasi diarahkan bagi kelangsungan masyarakat, kelompok sosial dan kebudayaan.

Jadi berdasarkan hasil wawancara secara keseluruhan pada indikator sosialisasi yakni didapatkan kesimpulan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat yakni sebuah interaksi baik itu secara langsung dengan bertatap muka dan melakukan diskusi-diskusi mengenai isu-isu dalam pertanian serta observasi yang dilakukan oleh pemerintah, serta proses sosialisasi ini ada beberapa tahapan seperti mengidentifikasi masalah, mencari solusi dan penindakan pemberdayaan itu sendiri. Sehingga respon masyarakat sangat baik pada sosialisasi yang dilakukan dibuktikan dengan partisipasi masyarakat tani yang aktif dan terbuka pada sosialisasi yang dilakukan. Kemudian dampak dari sosialisasi tersebut juga mampu memberikan informasi yang valid dan terpercaya kepada masyarakat tani dan dampak bagi pemerintah yakni dengan mudahnya sosialisasi diterima tentu akan mudah juga penerapan pemberdayaan masyarakat tani yang ada di kelurahan manggala.

Pendampingan

Pendampingan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh fasilitator atau pendamping masyarakat dalam berbagai kegiatan program. Fasilitator juga seringkali disebut fasilitator masyarakat

(community facilitator/CF) karena tugasnya lebih sebagai pendorong, penggerak, katalisator, motivator masyarakat, sementara pelaku dan pengelola kegiatan adalah masyarakat sendiri. Pendampingan sebagai suatu strategi yang umum digunakan oleh pemerintah dan lembaga non profit dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia, sehingga mampu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari permasalahan yang dialami dan berupaya untuk mencari alternative pemecahan masalah yang dihadapi. Kemampuan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh keberdayaan dirinya sendiri. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kegiatan pemberdayaan disetiap kegiatan pendampingan, Suharto menguraikan bahwa pendampingan merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

Jadi pada indikator pendampingan dapat disimpulkan bahwasannya pendampingan yang dilakukan pemerintah yakni dengan memberikan fasilitator untuk menghubungkan masyarakat dengan pemerintah secara langsung, serta tentunya peran fasilitator yang menjadi media penghubung juga tentunya serta sebageian besar fasilitator yang bekerja

dalam pemberdayaan. Serta pendampingan juga tidak lepas dari fasilitator, pendampingan ini berfungsi sebagai bimbingan atau proses belajar masyarakat yang diberdayakan agar tetap pada prosedur yang sesuai.

Pelatihan

Pelatihan yakni serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman keterampilan, keahlian, penambahan pengetahuan, serta perubahan sikap seorang individu. Peningkatan akan kemampuan dan keahlian para SDM tersebut berkaitan dengan jabatan atau fungsi yang menjadi tanggung jawabnya saat ini. Sasaran yang ingin dicapai dari adanya program pelatihan adalah peningkatan kinerja individu dalam jabatan atau fungsinya saat ini. Oleh sebab itu, bentuk latihan atau training dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kinerja tertentu, terinci dan rutin. Proses pelatihan difokuskan pada pelaksanaan pekerjaan dan penerapan pemahaman serta pengetahuan sehingga hasil yang diinginkan adalah penguasaan atau peningkatan keterampilan.

Jadi berdasarkan keseluruhan pada indikator pelatihan dapat disimpulkan bahwasanya pelatihan yang

dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat tani ada beberapa yakni pelatihan pemanfaatan teknologi digital, kemudian ada pelatihan penggunaan alat-alat pertanian dengan menggunakan mesin, serta pelatihan untuk masyarakat mampu mengolah sendiri hasil pertaniannya sendiri, kemudian untuk target sasaran pemberdayaan pertanian ini yakni tentu adalah masyarakat tani yang diharapkan untuk mampu mandiri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani sendiri, serta dalam mekanisme pelaksanaan pemberdayaan yakni sebagai berikut mekanisme pemberdayaan masyarakat tani ini dilakukan berdasarkan modul dan pedoman pemberdayaan itu sendiri adapun mekanisme dari pemberdayaan masyarakat tani ini tahapan awal yakni melakukan sosialisasi dan menjalin hubungan dengan sasaran masyarakat yang dituju kemudian masuk ke proses pemberdayaan dimana pada proses tersebut terdapat tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, setelah itu di tahapan mekanisme akhir ada pemandirian masyarakat dari hasil pemberdayaan.

Kunjungan Lapangan

Pada pengumpulan data kegiatan yang paling penting dalam melakukan kunjungan lapangan. Semua kegiatan kunjungan lapangan yang dilakukan dengan pengamatan dimaksudkan dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan, antara lain demografi setempat, kesesuaian peruntukkan lahan dan bangunan serta apa saja kebutuhan dan lain sebagainya bisa terlihat sangat jelas.

Jadi berdasarkan indikator di atas bahwasanya kunjungan pada pemberdayaan masyarakat tani di kelurahan Manggala Kota Makassar tidak membutuhkan persiapan, dan juga kunjungan ini adalah salah satu tugas penting dari pemerintah untuk melihat secara langsung seberapa besar progres kegiatan apa saja kendala yang dihadapi dan untuk membuat sebuah data perlu di adakan observasi langsung dengan mengadakan tinjauan langsung.

Faktor penghambat yakni adalah kendala yang didapatkan dalam melakukan pemberdayaan pertanian, dan mampu membuat kegagalan dari sebuah proses yang dilakukan, sedangkan untuk faktor pendorong yakni adalah faktor dimana yang mendorong untuk berjalan dengan baik

dan mampu mempermudah keberhasilan dari sebuah proses.

Jadi dapat disimpulkan pada indikator faktor penghambat dan pendorong yakni kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan ini berada pada anggaran yang tidak mencukupi, dan kurangnya tenaga fasilitator sebagai pendamping pemberdayaan masyarakat tani, serta kurangnya fasilitas sarana dan prasarana serta untuk pendukung terlaksananya pemberdayaan masyarakat selain memang tugas pemerintah memperhatikan masyarakatnya, juga dikarenakan mayoritas kelurahan manggala memang memiliki mata pencaharian petani dan antusias masyarakat terlibat dan melaksanakan pemberdayaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa: 1). pada indikator sosialisasi yakni didapatkan kesimpulan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat yakni sebuah interaksi baik itu secara langsung dengan bertatap muka dan melakukan diskusi-diskusi mengenai isu-isu dalam pertanian serta observasi yang dilakukan oleh pemerintah, serta proses sosialisasi ini ada beberapa tahapan seperti mengidentifikasi masalah, mencari solusi dan penindakan

pemberdayaan itu sendiri. Sehingga respon masyarakat sangat baik pada sosialisasi yang dilakukan dibuktikan dengan partisipasi masyarakat tani yang aktif dan terbuka pada sosialisasi yang dilakukan. Kemudian dampak dari sosialisasi tersebut juga mampu memberikan informasi yang valid dan terpercaya kepada masyarakat tani dan dampak bagi pemerintah yakni dengan mudahnya sosialisasi diterima tentu akan mudah juga penerapan pemberdayaan masyarakat tani yang ada di kelurahan manggala. 2). indikator pendampingan dapat disimpulkan bahwasannya pendampingan yang dilakukan pemerintah yakni dengan memberikan fasilitator untuk menghubungkan masyarakat dengan pemerintah secara langsung, serta tentunya peran fasilitator yang menjadi media penghubung juga tentunya serta sebgai besar fasilitator yang bekerja dalam pemberdayaan. 3). pada indikator pelatihan dapat disimpulkan bahwasannya pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat tani ada beberapa yakni pelatihan pemanfaatan teknologi digital, kemudian ada pelatihan penggunaan alat-alat pertanian dengan menggunakan mesin, serta pelatihan untuk masyarakat mampu mengolah sendiri hasil pertaniannya sendiri,

kemudian untuk target sasaran pemberdayaan pertanian ini yakni tentu adalah masyarakat tani yang diharapkan untuk mampu mandiri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani sendiri, serta dalam mekanisme pelaksanaan pemberdayaan yakni sebagai berikut mekanisme pemberdayaan masyarakat tani ini dilakukan berdasarkan modul dan pedoman pemberdayaan itu sendiri adapun mekanisme dari pemberdayaan masyarakat tani ini tahapan awal yakni melakukan sosialisasi dan menjalin hubungan dengan sasaran masyarakat yang dituju kemudian masuk ke proses pemberdayaan dimana pada proses tersebut terdapat tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, setelah itu di tahapan mekanisme akhir ada pemandirian masyarakat dari hasil pemberdayaan. 4). berdasarkan indikator di atas bahwasannya kunjungan pada pemberdayaan masyarakat tani di kelurahan Manggala Kota Makassar tidak membutuhkan persiapan, dan juga kunjungan ini adalah salah satu tugas penting dari pemerintah untuk melihat secara langsung seberapa besar progres kegiatan apa saja kendala yang dihadapi dan untuk membuat sebuah data perlu di adakan observasi langsung dengan mengadakan tinjauan langsung. 5). indikator faktor penghambat dan

pendorong yakni kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan ini berada pada anggaran yang tidak mencukupi, dan kurangnya tenaga fasilitator sebagai pendamping pemberdayaan masyarakat tani, serta kurangnya fasilitas sarana dan prasarana serta untuk pendukung terlaksananya pemberdayaan masyarakat selain memang tugas pemerintah memperhatikan masyarakatnya, juga dikarenakan mayoritas kelurahan manggala memang memiliki mata pencaharian petani dan antusias masyarakat terlibat dan melaksanakan pemberdayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambar Teguh Sulistyani, 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Basuki, Ananto dan Shofwan (2006) *Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis Good Governance*. Malang, Sekretariat Penguatan Otonomi Desa (SPOD).
- Djohani, R. (2003) *Pertisipasi, Pemberdayaan, dan Demokrasi Komunitas*. Bandung: Studio Driya Media
- Fadhillah, Nafi' Rachmah. 2016. *Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sentul Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang*. Kajian Otonomi Daerah. Volume 1 Nomor 1.
- Ife J dan Tesoriero, F. (2008). *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi: Comunity Development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.
- Mulyadi, Deddy.2015. *Study Kebijakan Pubik dan Pelayanan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik)*. Bandung : Alfabeta.
- Porawouw, 2005. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Pengembangan Masyarakat di Desa Panasen Kecamatan Kakas*. Skripsi. Fakultas Pertanian.UNSRAT. Manado
- Rachman, Taufiq. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Saptana, dkk. 2006. *Pengembangan Kelembagaan Kemitraan Usaha Hortikultura di Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Bali*. Bogor: Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat.
- Sedarmayanti. (2004), *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju
- Syamsuddin. 2009. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.